

RANCANGAN AKHIR RENJA 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI

Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi

Telp. (0351)749068

e-mail: diskipum@ngawikab.go.id



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi menyusun Dokumen Rencana Kerja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan:

1. Arah Pembangunan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-4 (ke-empat) yaitu “Pengembangan Teknologi Guna Mewujudkan Kabupaten Ngawi yang Sejahtera”;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan IV dan Tahun 2022 Triwulan IV;
3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
5. Isu-isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Ngawi yang berkembang saat ini dan prediksi pada masa mendatang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan

menghasilkan dokumen penganggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317.Tahun 2023;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
- l. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
- m. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 10);
- n. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 71);
- o. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025;
4. Meningkatkan Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bab ini memuat:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2023 dan dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Bab ini memuat:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran yang berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bab ini memuat:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 20232.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat *outcome* dan *output*. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang akan dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
- d. Kebijakan-kebijakan dalam melaksanakannya.

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 juga memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Ngawi

Nama PD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.17.2.17.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun								
2.17.2.17.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu								
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun		4 Dokumen					4 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun		11 Dokumen					11 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	200%
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan OPD yang disusun		6 Dokumen					6 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	200%
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu								
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	26 Dokumen	78 Dokumen	300%
		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1118 Kali					1,118 Kali	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	200%
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	117%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan					50 Laporan	50 Laporan	100%
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun								
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	100 Paket	200%
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang					26 Orang	26 Orang	100%
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang					100 Orang	100 Orang	100%
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang					45 Orang	45 Orang	100%
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun								
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan		100 %					100 %	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	100%	48 Paket	96 Paket	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %					100 %	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	40 Paket	200%
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air isi ulang yang disediakan		100 Galon					100 Galon	
		Jumlah makanan yang disediakan		600 Kotak					600 Kotak	
		Jumlah minuman yang disediakan		100 Botol/ Dus					100 Botol/ Dus	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	200 Paket	200%
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak		70 Lembar					70 Lembar	
		Jumlah Barang yang Digandakan	5220 Lembar	5190 Lembar	5215 Lembar	5215 Lembar	100%	5220 Lembar	15,625 Lembar	299%
		Jumlah iklan/publikasi media cetak		1 Kali					1 Kali	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	3 Paket	7 Paket	233%
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang Disediakan		80 Eksemplar					80 Eksemplar	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10 Dokumen	22 Dokumen	220%
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	100 Kotak					100 Kotak	100 Kotak	100%
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		34 Kali					34 Kali	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		155 Kali					155 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		165 Laporan	165 Laporan	100%	50 Laporan	215 Laporan	430%
		Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	100 Kotak		100 Kotak	100 Kotak	100%	100 Kotak	200 Kotak	200%
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun								
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan		5 Unit					5 Unit	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100%
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit	7 Unit	140%
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	10 Unit	6 Unit				10 Unit	16 Unit	160%
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun								
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar		12 Rekening					12 Rekening	
		Jumlah rekening internet yang dibayar		24 Rekening					24 Rekening	
		Jumlah rekening listrik yang dibayar		48 Rekening					48 Rekening	
		Jumlah rekening telepon yang dibayar		12 Rekening					12 Rekening	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	96 Laporan	200%
		Jumlah penambahan daya listrik								
		Jumlah pemasangan daya listrik								
		Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	1 Kali		1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	200%
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli		27 Jenis					27 Jenis	
		Jumlah bahan kebersihan yang dibeli		10 Jenis					10 Jenis	
		Jumlah pembayaran jasa keamanan		24 Kali					24 Kali	
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan		24 Kali					24 Kali	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor		92 Kali					92 Kali	
		Jumlah pembayaran lembur		84 Kali					84 Kali	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	15 Laporan	27 Laporan	180%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun								
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya		1 Unit					1 Unit	
		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		1 Unit					1 Unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	200%
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya		2 Unit					2 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang		2 Unit					2 Unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	200%
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100%
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja		28 Kali					28 Kali	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	60 Unit	200%
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	200%
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		14 Unit					14 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			14 Unit	14 Unit	100%		14 Unit	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan		5 Koperasi					5 Koperasi	
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha		6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	100%	70 Unit Usaha	76 Unit Usaha	109%
		Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi penerbitan ijin	3 Koperasi					3 Koperasi	3 Koperasi	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%	3 Unit Usaha	5 Unit Usaha	167%
2.17.03.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Unit Usaha		400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	100%	400 Unit Usaha	800 Unit Usaha	200%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa		400 Koperasi					400 Koperasi	
		Jumlah input data koperasi yang RAT sistem NIK		75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100%		150 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	100%		400 Unit Usaha	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha					20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan	100 Unit Usaha					100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi								
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kesehatan yang dilaksanakan		300 Kali					300 Kali	
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	53 Unit Usaha		53 Unit Usaha	53 Unit Usaha	100%	53 Unit Usaha	106 Unit Usaha	200%
2.17.04.2.01.0002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah even penghargaan kesehatan koperasi yang diadakan		1 even					1 Even	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	500 Unit Usaha					500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan latihan perkoperasian								
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	1220 Orang	450 Orang	125 Orang	125 Orang	100%	1220 Orang	1,795 Orang	147%
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22 %		21 %	21 %	100%	22 %	43 %	195%
		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1 %		1 %	1 %	100%	1 %	2 %	200%
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69 %		66 %	66 %	100%	69 %	135 %	196%
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang		80 Orang	80 Orang	100%	300 Orang	380 Orang	127%
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Usaha mikro yang menindaklanjuti Pendidikan dan latihan								
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		450 Orang					450 Orang	
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKM yang Menindaklanjuti Pendidikan								
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			160 Orang	160 Orang	100%		160 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran								
		Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya								
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar								
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah even pameran yang diikuti		1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%		2 Kali	
		Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi akses modal			6 Koperasi	6 Koperasi	100%		6 Koperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			1.5 %	1.5 %	100%		1.5 %	
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 KK		30 KK	30 KK	100%	40 KK	70 KK	175%
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	30 Kelompok Masyarakat					30 Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	100%
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2 Unit Usaha					2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	3 Unit Usaha					3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100%
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2 Unit Usaha					2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2 Unit Usaha					2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30 Unit Usaha					30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100%
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Onit Osaha					30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan								
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan								
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pemetaan Usaha Mikro yang disusun/diadakan		1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%		10 Unit Usaha	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta pelatihan yang Mendapatkan Nilai 75			150 Orang	150 Orang	100%		150 Orang	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		9.3 %	10.5 Rasio	10.5 Rasio	100%		19.8 %	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)		55.2 %	64.6 %	64.6 %	100%		119.8 %	
		Jumlah Dokumen Pemetaan Usaha Mikro			1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya	10 Unit Usaha	10 UM				10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	200%
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		1.09 %					1.09 %	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi perijinan		9 UM					9 UM	
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	140 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%	140 Unit Usaha	150 Unit Usaha	107%
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90 Unit Usaha					90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100%
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembiayaan		90 UM					90 UM	
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	70 Orang					70 Orang	70 Orang	100%
2.17.07.2.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			120 Orang	120 Orang	100%		120 Orang	
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	75 Unit Usaha					75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha					3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100%
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	80700 Unit Usaha					80700 Unit Usaha	80,700 Unit Usaha	100%
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	130 Unit Usaha					130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	100%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset								
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran								
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		10 UM	10 UM	10 UM	100%		20 UM	
		Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti pelatihan		550 UM	50 UM	50 UM	100%		600 UM	
		Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi		25 UM	25 UM	25 UM	100%		50 UM	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha					10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	3 Orang					3 Orang	3 Orang	100%
2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	3 Lembaga					3 Lembaga	3 Lembaga	100%
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Lembaga					3 Lembaga	3 Lembaga	100%
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha					100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan								
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan								
		Jumlah monitoring dan pengawalan ketransmigrasian								
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data administrasi pendaftaran transmigran	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
		Jumlah penjajakan, monitoring dan pengawalan		1 Lokasi					1 Lokasi	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama			1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	14 KK					14 KK	14 KK	100%
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	14 KK					14 KK	14 KK	100%
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15 Orang					15 Orang	15 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	1 Lokasi					1 Lokasi	1 Lokasi	100%
3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Orang					15 Orang	15 Orang	100%
3.32.03.2.01.0011	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0015	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	15 Orang					15 Orang	15 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	15 KK					15 KK	15 KK	100%
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	15 Paket					15 Paket	15 Paket	100%
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi					1 Lokasi	1 Lokasi	100%

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Triwulan I Periode Pelaksanaan Tahun 2024

No	Kode			Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
										I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17		
	0	0		NON URUSAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	0	0		NON URUSAN																											
1	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																											
	0	0	1	2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1 Perangkat Daerah																											
	0	0	1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	0	Dokumen	31.133.000	0	0	0	31.133.000	0	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	0,00	9	0	2.650.000	0	8,51	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	0	Dokumen	31.133.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,00	Dokumen	31.133.000	0	9,00		9,00		0	0	0	0	0	9,00	100,00	9,00			100				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0	0	1	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan OPD yang disusun	0	Dokumen	1.906.000	0	0	0	1.906.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,00	Laporan	1.906.000	0	7,00		7,00		0	0	0	0	7,00	100,00	7,00			100					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0	0	1	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																											
	0	0	1	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN	26,00	Dokumen	4.572.808.873	0	26,00	4.572.808.873	6,00	822.195.518	0	0	0	0	0	6,00	822.195.518	23,08	18	6,00	822.195.518	23,08	17,98	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
					Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	0	Kali	4.572.808.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	Orang/Bulan	4.572.808.873	0	40,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	Dokumen	2.369.000	0	0	0	2.369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	6,00	Laporan	2.369.000	0	6,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
	0	0	1	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/	0	%	1.802.000	0	0	0	1.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	48,00	Paket	1.802.000	0	48,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	0	%	10.679.000	0	0	0	10.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	20,00	Paket	10.679.000	0	20,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air isi ulang yang disediakan	0	Galon	6.736.000	0	0	0	6.736.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah makanan yang disediakan	0	Kotak	6.736.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah minuman yang disediakan	0	Botol/Dus	6.736.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	6.736.000	0	100		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	0	Lembar	5.406.300	0	0	0	5.406.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Barang yang Digandakan	5.220,0	Lembar	5.406.300	0	5.220,0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah iklan/publikasi media cetak	0	Kali	5.406.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00	Paket	5.406.300	0	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang undangan yang disediakan	0	Buku	3.180.000	0	0	0	3.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Surat Kabar yang Disediakan	0	Eksemplar	3.180.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	10,00	Dokumen	3.180.000	0	10,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
							I		II		III		IV														
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6+12	15 = 14/5x100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							16	17									
	0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	0	Kali	62.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
					Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang	0	Kali	62.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50,00	Laporan	62.010.000	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
					Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	100	Kotak	62.010.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0	0	1	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	0	0	1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	0	Unit	718	0	0	0	718	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5,00	Unit	718	0	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0	0	1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	0	Unit	1.322.869	0	0	0	1.322.869	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00	Unit	1.322.869	0	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	0	0	1	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	0	Rekening	51.794.736	0	0	0	51.794.736	0	3.202.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah rekening internet yang dibayar	0	Rekening	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah rekening listrik yang dibayar	0	Rekening	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah rekening telepon yang dibayar	0	Rekening	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	48,00	Laporan	51.794.736	0	48,00	12,00	0	0	0	0	0	12,00	25,00	12,00	25					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah penambahan daya listrik	0	KWH	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah pemasangan daya listrik	0	Titik	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	0	Kali	51.794.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	0	Buah	120.636.000	0	0	0	120.636.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	0	Buah	120.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah pembayaran jasa keamanan	0	Kali	120.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah pembayaran jasa kebersihan	0	Kali	120.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00	Laporan	120.636.000	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	0	Kali	67.218.000	0	0	0	67.218.000	0	4.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah pembayaran lembur	0	Kali	67.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah pembayaran jasa operator	24,00	Kali	67.218.000	0	24,00	6,00	0	0	0	0	0	0	6,00	25,00	6,00	25				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	15,00	Laporan	67.218.000	0	15,00	3,00	0	0	0	0	0	0	3,00	20,00	3,00	20				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	0	0	1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	0	Unit	12.689.728	0	0	0	12.689.728	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	0	Unit	12.689.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1,00	Unit	12.689.728	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar	0	Unit	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0	Unit	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2,00	Unit	4.800.000	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
							I		II		III		IV														
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6+12	15 = 14/5x100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
	0	0	1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	0	Kali	2.190.000	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30,00	Unit	2.190.000	0	30,00		0		0		0		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													5,05	10	5,05		10										
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
2	2	17	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK																						
2	2	17	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,																						
2	2	17	2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																						
2	2	17	2	2.0	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah																						
2	2	17	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan	0	Koperasi	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang		3,00	Unit Usaha	28.000.000	0	3,00		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah koperasi yang mendapat fasilitas penerbitan ijin		3,00	Koperasi	28.000.000	0	3,00		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	2	17	2	2.0	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam																						
2	2	17	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan rekomendasi	0	Koperasi	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi		2,00	Unit Usaha	3.000.000	0	2,00		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0	0	0		0										
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
3	2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																						
2	2	17	3	2.0	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang																						
2	2	17	3	03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola	50,00	Unit Usaha	27.000.000	0	50,00	27.000.000	30,00	0	0	0	0	0	30,00	0	60,00	0	30,00	0	60	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2	17	3	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan	400	Unit Usaha	118.500.000	0	400	118.500.000	200	0	0	0	0	0	200	0	50,00	0	200	0	50	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													55	0	55		0										
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah	Rendah		Sangat Rendah										
4	2	17	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																						
2	2	17	4	2.0	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah																						
2	2	17	4	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kesehatan yang dilaksanakan	0	Kali	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian		50,00	Unit Usaha	24.000.000	0	50,00		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	2	17	4	03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	Unit Usaha	102.500.000	0	100	102.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0	0	0		0										
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah										
5	2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																						
2	2	17	5	2.0	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah																						
2	2	17	5	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0	Orang	200.000.000	0	0	200.000.000	0	155.343.800	0	0	0	0	155.343.800	0,00	78	0	155.343.800	0	77,67	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi		0	%	200.000.000	0	0		0		0		0		0		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti		0	%	200.000.000	0	0		0		0		0		0,00		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan		0	%	200.000.000	0	0		0		0		0		0,00		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah fasilitasi pelatihan SDM koperasi		0	Orang	200.000.000	0	0		0		0		0		0,00		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		300	Orang	200.000.000	0	300		100		0		0		100		33,33		100		33,33	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				5		6		7		I		II		III		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11 K Rp	13=12/7x100% K Rp	14 = 6+12 K Rp	15 = 14/5x100 K Rp	16	17						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	5,56	77,67			5,56	77,67							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi							
6	2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																									
	2	17	6	2.0	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
	2	17	6	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	40,00	KK	27.000.000	0	0	40,00	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	6	05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses	3,00	Unit Usaha	500.000.000	0	0	3,00	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0	0			0	0							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
7	2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																									
	2	17	7	2.0	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,																								
	2	17	7	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya	0	UM	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	72.784.900	0	0	0	0	0	0	72.784.900	0,00	44	0	72.784.900	0	44,11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha	260,00	Unit Usaha	165.000.000	0		260,00		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi perijinan	0	UM	39.017.000	0	0	0	39.017.000	0	38.984.500	0	0	0	0	0	0	38.984.500	0,00	100	0	38.984.500	0	99,92	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	65,00	Unit Usaha	39.017.000	0		65,00		65,00		0		65,00		100,00		65,00		100		100		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Jejaring Pasarnya Ditindak Lanjuti	0	UM	100.988.600	0	0	0	100.988.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	100	Unit Usaha	100.988.600	0		100		0		0		0		0,00		0		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	0	Orang		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan SDM	0	Unit Usaha		0	0		0		0		0		0		0,00		0		0		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3,00	Unit Usaha	150.000.000	0	0	3,00	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	11,11	72,01			11,11	72,01							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sedang							
8	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																									
	2	17	8	2.0	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																								
	2	17	8	06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	50,00	Unit Usaha	95.000.000	0	0	50,00	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0	0			0	0							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
9	3	32	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
	3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																									
9	3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																									
	3	32	3	2.0	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
	3	32	3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1	Jumlah data administrasi pendaftaran transmigran	1,00	Laporan	20.000.000	0	0	1,00	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah peninjakan, monitoring dan pengawasan ketransmigrasian	0	Dokumen	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama	0	Dokumen	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	32	3	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	120,00	KK	55.000.000	0	0	120,00	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0	0			0	0							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																	8,52	17,74			8,52	17,74							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/ keluaran dari program/ kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi berdasar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dan 2024 yang berdasar pada Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan perubahan Rencana Strategis.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			80,25	88,6	88,7	88,8			88,7	88,8	
2	Persentase Koperasi yang berkualitas		Persentase koperasi yang berkualitas	75%	92%	94%	96%	92,15%		94%	96%	
3	Pesentase UKM yang meningkat omsetnya			6,5%	6,7%	6,9%	7,10%	7,01%		6,9%	7,10%	
4	Presentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi			81%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5			Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	60%	80%	100%	20,83%		80%	100%	
6			Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
7			Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	93%	96%	97%	100%	92,15%		97%	100%	
8			Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	93%	96%	97%	100%	73,73%		97%	100%	
9			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	93%	96%	97%	100%	98,98%		97%	100%	
10			Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	3%	4%	5%	6%	4,31%		5%	6%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
11			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	93%	96%	97%	100%	92,15%		97%	100%	
12			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan									
13			Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/	85%	90%	95%	100%	79,86%		95%	100%	
14			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	5,63%		5,6%	5,8%	
15			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	5,63%		5,6%	5,8%	
16			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	5,63%		5,6%	5,8%	
17			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	5,63%		5,6%	5,8%	
18			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala	55%	60%	65%	70%	80,22%		65%	70%	
19			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	45%	60%	75%	100%	100%		75%	100%	
20			Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	85%	90%	95%	100%	46,81%		95%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Dinkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Analisis
21			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	20%	30%	40%	50%	43,83%		40%	50%	
22			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	70%	80%	90%	100%	41,08%		90%	100%	
23			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	50%	60%	70%	80%	27,65%		70%	80%	
24			Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	9%	12%	15%	18%	5,74%		15%	18%	

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, yaitu:

1. Tabel 2.1

Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pada Tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) program dengan 17 kegiatan dan 34 subkegiatan secara umum tingkat realisasi kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2023 mencapai 100% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun berjalan mencapai 100%.

2. Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perubahan 2021 – 2026. Pada Tahun 2023 terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara keseluruhan memenuhi target, yaitu pada indikator:

a) Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Target: 80,25, realisasi: belum dirilis

b) Persentase koperasi yang berkualitas

Target: 75%, realisasi: 92,15% (122,87%)

c) Pesentase UKM yang meningkat omsetnya

Target: 6,5%, realisasi 7,01% (107,85%)

d) Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi

Target: 81%, realisasi: 100% (123,45%)

Untuk Tahun 2023 mengacu Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

Dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan tingkat pendidikan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi saat ini masih perlu ditingkatkan, Dinas Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Secara internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelola kegiatan;
3. Kurangnya tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
4. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
5. Kurangnya inovasi dan kualitas produk Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
6. Kurangnya permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah;
8. Rendahnya daya saing produk Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi dampak global.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi mempunyai isu-isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas dan produktifitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang masih sangat terbatas. Produktifitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.
2. Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan representasi dari fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3. Kualitas kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi yang semakin berkualitas akan meningkatkan produktifitas koperasi tersebut dan secara tidak langsung akan semakin tertata dengan baik.
4. Penguatan kelompok-kelompok strategis sebagai embrio koperasi. Dalam meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian, maka dilakukan penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dan potensial untuk diberdayakan menjadi embrio koperasi, diantaranya kelompok pengajian, kelompok masyarakat desa hutan, dan lain-lain.
5. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Kesejahteraan pemerataan pertumbuhan: kemiskinan, pengangguran dan kerentanan ekonomi masyarakat desa.
8. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan.
9. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
10. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang berkompeten.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, karena beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik dimana dalam pendiriannya belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota, namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi yang menjadi landasan operasionalnya.
- b. Ketertinggalan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disebabkan karena kurangmuya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- c. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro yang bermodal kecil yang umumnya tidak

berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, dan belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang struktur kelembagaan dan insentif yang unik/ khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.

- d. Masih terbatasnya pemasaran produk unggulan usaha mikro ditingkat lokal dan regional, diharapkan dengan fasilitas yang disediakan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk lebih mempromosikan produknya sehingga bisa lebih dikenal masyarakat luas.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Adanya dukungan *stakeholder* dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Ancaman/ Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Kurangnya koordinasi antar lembaga / instansi.
 - b. Peraturan yang tidak konsisten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan program usulan setelah penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Ngawi

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					13.684.855.022,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					7.210.856.044,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	6.810.501.022,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	5.590.817.584,00	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	90.000.000	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	43.338.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	64.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	42.645.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	693.500	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	5.235.601.022,00	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	4.572.809.225,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.215.601.022,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.572.809.225	
			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun	26 Dokumen				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun	26 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	169.000.000,00	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkop & UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	16.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkop & UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	46.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	57.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	386.000.000,00	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	88.610.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	32.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	1.802.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	67.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.181.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	39.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	5.880.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.897.500	
			Jumlah Barang yang Digandakan	5220 Lembar				Jumlah Barang yang Digandakan	5220 Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	22.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkop & UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.840.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	3.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	-	
			Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	100 Kotak				Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	0 Kotak		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	196.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	62.010.000	
			Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	100 Kotak				Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	100 Kotak		

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	360.900.000,00	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	585.182.364,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.900.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	492.400.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	161.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	26.000.000	Pengadaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	13.516.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	66.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	79.266.364	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	42.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	321.000.000,00	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	270.876.995,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	97.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	72.223.995	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Laporan	130.130.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	177.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkop & UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	68.523.000	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	248.000.000,00	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100%	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinkop & UKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	32.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkop & UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan izin Usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	130.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan izin Usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	38.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	65.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	32.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	65.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	32.000.000	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70%	65.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70%	6.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai	Dinkop & UKM	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	65.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai	Dinkop & UKM	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	6.000.000	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Presentase koperasi yang taat perundang undangan	80%	375.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Presentase koperasi yang taat perundang undangan	80%	197.500.000	
	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Presentase koperasi aktif	80%	375.000.000	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Presentase koperasi aktif	80%	197.500.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	90.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	64.500.000	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100 Unit Usaha	285.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	133.000.000	
			Jumlah input data koperasi yang RAT sistem NIK	80 Dokumen							
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Presentase koperasi dengan kualifikasi sehat dan cukup sehat	40%	750.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Presentase koperasi dengan kualifikasi sehat dan cukup sehat	40%	48.500.000	
	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase koperasi yang tertib aset	80%	750.000.000	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase koperasi yang tertib aset	80%	48.500.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	500 Unit Usaha	500.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	26.500.500	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	500 Unit Usaha	250.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dinkop & UKM	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	21.999.500	
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Presentase pengelola yang bersertifikat	60%	2.742.057.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Presentase pengelola yang bersertifikat	60%	100.000.000	
	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang SDM koperasi berkompeten	60%	2.742.057.000	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang SDM koperasi berkompeten	60%	100.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Ngawi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1300 Orang	2.742.057.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Ngawi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	100.000.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Presentase koperasi yang meningkat volume usahanya	70%	410.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Presentase koperasi yang meningkat volume usahanya	70%	416.000.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase koperasi menindaklanjuti pemberdayaan	100%	410.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase koperasi menindaklanjuti pemberdayaan	100%	416.000.000	
			Presentase koperasi yang terakses permodalan	100%				Presentase koperasi yang terakses permodalan	100%		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	70.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga	41.000.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	100.000.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 Unit Usaha	250.000.000	
	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	3 Unit Usaha	100.000.000	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2 Unit Usaha	50.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2 Unit Usaha	65.000.000	
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	400 Unit Usaha	50.000.000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	0	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	40.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	60.000.000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Presentase kualitas produk UKM	100%	1.280.001.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Presentase kualitas produk UKM	100%	612.038.460,00	
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Wirausaha baru	50 WUB	1.280.001.000	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Wirausaha baru	50 WUB	612.038.460	
			Presentase UKM yang berijin	100%				Presentase UKM yang berijin	100%		
			Presentase UKM yang bermitra	100%				Presentase UKM yang bermitra	100%		
			Presentase UKM yang produknya tersertifikasi	100%				Presentase UKM yang produknya tersertifikasi	100%		
			Presentase UKM yang SDMnya bersertifikasi	100%				Presentase UKM yang SDMnya bersertifikasi	100%		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	205.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	115.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	140 Unit Usaha	85.398.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	130 Unit Usaha	143.000.500	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	110 Unit Usaha	106.640.460	
	Pemulihan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	150.000.000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	320.000.000	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1000 Unit Usaha	100.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dinkop & UKM	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinkop & UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	567.000.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinkop & UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	180 Orang	100.000.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Ptg
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UKM yang terakses pasar	100%	727.296.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UKM yang terakses pasar	100%	158.000.000	
	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase UKM yang difasilitasi lokasi penjualannya	60%	727.296.000	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase UKM yang difasilitasi lokasi penjualannya	60%	158.000.000	
			Persentase UKM yang terakses media promosi	60%				Persentase UKM yang terakses media promosi	60%		
	Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Ngawi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	527.296.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Ngawi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab.Ngawi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	200.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab.Ngawi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	158.000.000	
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan	100%	460.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan	100%	50.000.000	
	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah monitoring dan pengawalan ketransmigrasian	1 Kali	460.000.000	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah monitoring dan pengawalan ketransmigrasian	1 Kali	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	90.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	130.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 Kepala Keluarga	0	
	Penyuluhan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kepala Keluarga	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	120 Kepala Keluarga	35.000.000	
	Pelatihan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	30.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0 Orang	0	
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	50 Orang	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	0 Orang	0	
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampung Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	10 KK	30.000.000	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampung Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	0 KK	0	
	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	10 Paket	30.000.000	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	0 Paket	0	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Daerah penempatan transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor yaitu:

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata;
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/ karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah;
5. Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Ngawi yang akan mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan; dan

6. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu:

- a) Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya,
- b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
- c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel,
- d) Kemampuan dalam menghadapi multidimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan,
- e) Pemantapan komunikasi publik dan *stakeholders* tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan,
- f) Pemantapan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Musyawaran Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan. Dalam urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran.

Beberapa usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari usulan Dewan maupun Masyarakat yang belum dapat di akomodir karena terbatas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah namun untuk merespon kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka di berikan kegiatan yang dapat membina dan memberdayakan masyarakat yaitu pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis peningkatan ketrampilan.

Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yangkomprehensif selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kasreman, Kec. Geneng Kab. Ngawi	Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengolahan makanan	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 28.000.000,-	
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pakah I Dusun Pakah I RT 03 RW 02, Kec. Mantingan Kab. Ngawi	kurangnya pengetahuan tentang olahan makanan UMKM anggota PKK dan Masyarakat	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 10.000.000,-	
3	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Ngrayudan, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi	Pengelolaan Wisata Sumber Nogo, yang dilakukan oleh masyarakat	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 200.000.000 ,-	

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Ngrebeng, RT 05, RW 01, Pandean, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi	Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pandean khususnya pada kalangan muda mudi dalam pemanfaatan sampah yang ada di lingkungan desa. Sampah-sampah yang terkumpul menjadi limbah dan mencemari tanah, dan lahan pertanian. Oleh karena itu diperlukan sebuah pelatihan sekaligus sosialisasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di Desa Pandean	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 100.000.000 ,-	
5	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi	Tingginya antusiasme masyarakat namun masih kurangnya kemampuan & inovasi pada produknya	Koefisien: 1 Paket; Anggaran: Rp 12.425.000	
6	Pemulihan Usaha Mikro	Dusun Jugong RT 002 RW 003 Desa Dumplengan, Kab. Ngawi	Kendala terbatasnya modal usaha	Koefisien: 1 Paket; Rp 100.000.000	

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pemulihan Usaha Mikro	Dsn. Mloso 02/06, Ds. Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi	Meningkatkan ekonomi pedagang Kelompok Usaha Bersama Mloso Sari	Koefisien: 1 Paket; Rp 100.000.000	
8	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dsn. Balepanjang 01/05, Ds. Jogorogo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi	Penambahan Modal Simpan Pinjam, Koperasi Putra Garuda Perkasa	Koefisien: 1 Paket; Rp 200.000.000	
9	Pemulihan Usaha Mikro	Desa Klitik RT 01 RW 02, Kab. Ngawi	Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal Pokmas Maju Utama	Koefisien: 1 Paket; Rp 115.000.000	
10	Pemulihan Usaha Mikro	Desa Karangasri RT 02 RW 07, Kab. Ngawi	Terbatasnya modal. Pokmas Rukun Asri	Koefisien: 1 Paket; Rp 80.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia Tahun 2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan II Tahun 2021-2026. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	9	11
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88,7	Perubahan target menyesuaikan capaian tahun sebelumnya
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase kenaikan omset usaha mikro	6,9%	
			Presentase pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan		
		Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase koperasi yang berkualitas	94%	Perubahan target menyesuaikan capaian tahun sebelumnya
			Presentase pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan		
			Jumlah usaha mikro mengalami kenaikan omset		
			Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6,90%	Perubahan berdasarkan review pohon kinerja
		Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	Perubahan target menyesuaikan capaian tahun sebelumnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi kedua yaitu Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Kemudahan Investasi, Pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 memiliki peran dalam skema perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Hal ini mengharuskan mampu menganalisa capaian kinerja yang masih belum tercapai sehingga pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dapat difokuskan untuk pencapaian kondisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Untuk memecahkan isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Program non urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sebanyak 9 Program, 16 Kegiatan, 64 Sub Kegiatan. Rencana pendanaan Program Kegiatan Tahun 2025 yaitu Rp 7.213.225.044,- untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 4.572.809.225,- .

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam jangka 1 (satu) tahun telah merencanakan program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi dan mencapai target yang diharapkan serta dukungan pendanaan yang di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN				7.213.225.044				14.126.603.344,54
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.163.225.044				13.352.603.344,54
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.163.225.044				13.352.603.344,54
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	5.593.186.584			100%	6.920.705.344,54
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu		100%	43.338.500			100%	90.000.000
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	9 Dokumen	42.645.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	64.000.000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.500.000
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.500.000
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.500.000
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.500.000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	7 Laporan	693.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	20.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun		100%	4.575.178.225			100%	5.287.755.344,54
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	40 Orang/bulan	4.572.809.225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang/bulan	5.267.755.344,54
		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun		26 Dokumen				26 Dokumen	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	6 Laporan	2.369.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	10.000.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi	0 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	10.000.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun		100%	0			100%	173.000.000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ngawi	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	52.000.000
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ngawi	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Orang	16.500.000
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	46.500.000
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Orang	58.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentaase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%	88.610.500			100%	399.000.000
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Paket	1.802.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Paket	33.000.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	12 Paket	11.181.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	69.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	100 Paket	5.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Paket	41.000.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi	4 Paket	3.897.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	30.000.000
		Jumlah barang yang digandakan		5220 Lembar				5240 Lembar	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi	24 Dokumen	3.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	25.500.000
2.17.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	3.500.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	55 Laporan	62.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Laporan	197.000.000
		Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	Kab. Ngawi	100 Kotak				100 Kotak	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%	585.182.364			100%	371.950.000
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Unit	492.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	38.450.000
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	162.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi	5 Unit	13.516.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	30.000.000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	5 Unit	79.266.364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	67.500.000
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	43.000.000
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	31.000.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	270.876.995			100%	324.000.000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Laporan	72.223.995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Laporan	98.000.000
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	37 Laporan	130.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	48.000.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	15 Laporan	68.523.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	178.000.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		100%	30.000.000			100%	275.000.000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi	1 Unit	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	58.000.000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi	2 Unit	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	58.000.000
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Ngawi	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	8.000.000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi	4 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	33.000.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	2 Unit	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	80.000.000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit	38.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjamuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		100 %	38.000.000			100%	140.000.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitasi penerbitan Nomer Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		100 %	32.000.000			100%	70.000.000
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	3 Unit Usaha	32.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		3 Unit Usaha	70.000.000
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		70 %	6.000.000			70%	70.000.000
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	3 Unit Usaha	6.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		3 Unit Usaha	70.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang taat perundang undangan	-	80 %	197.500.000			100%	395.000.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase koperasi aktif	-	80 %	197.500.000			100%	395.000.000
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		100 Unit Usaha	64.500.000	PENDAPATAN TRANSFER		100 Unit Usaha	95.000.000
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		100 Unit Usaha	133.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		100 Unit Usaha	300.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase koperasi dengan kualifikasi sehat dan cukup sehat	-	40 %	48.500.000			60%	800.000.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koperasi yang tertib aset	-	80 %	48.500.000			60%	800.000.000
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		50 Unit Usaha	26.500.500	PENDAPATAN TRANSFER		500 Unit Usaha	525.000.000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		50 Unit Usaha	21.999.500	PENDAPATAN TRANSFER		500 Unit Usaha	275.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengelola yang bersertifikat	-	60 %	100.000.000			100%	2.846.898.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wlayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	60 %	100.000.000			100%	2.846.898.000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		180 Orang	100.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		1300 Orang	2.846.898.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi yang meningkat volume usahanya	-	70 %	416.000.000			75%	802.000.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koperasi menindaklanjuti pemberdayaan	-	100 %	416.000.000			100%	802.000.000
		Presentase koperasi yang terakses permodalan		100%				100%	
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		40 Keluarga	41.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		60 KK	180.000.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		10 Unit Usaha	250.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		7 Unit Usaha	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	-	0 Unit Usaha	0	PENDAPATAN TRANSFER		4 Unit Usaha	10.000.000
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	-	2 Unit Usaha	65.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		4 Unit Usaha	100.000.000
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	-	0 Unit Usaha	0	PENDAPATAN TRANSFER		500 Unit Usaha	12.000.000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Unit Usaha	60.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		50 Unit Usaha	250.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase kualitas produk UKM	-	100 %	612.038.460	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	1.426.000.000
		Persentase UKM yang memiliki produk unggulan		100 %		PENDAPATAN TRANSFER		100 %	
		Persentase pertumbuhan UKM		52,39 %		PENDAPATAN TRANSFER		53 %	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha baru Presentase UKM yang berijin Presentase UKM yang bermitra Presentase UKM yang produknnya tersertifikasi Presentase UKM yang SDMnya bersertifikasi	-	50 WUB 100 % 100 % 100 % 100 %	612.038.460	PENDAPATAN TRANSFER		50 WUB 100 % 100 % 100 % 100 %	1.426.000.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	0 Unit Usaha	0	PENDAPATAN TRANSFER		20 Unit Usaha	210.000.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	140 Unit Usaha	85.398.000	PENDAPATAN TRANSFER		280 Unit Usaha	120.000.000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	110 Unit Usaha	106.640.460	PENDAPATAN TRANSFER		140 Unit Usaha	235.000.000
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	3 Unit Usaha	320.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Unit Usaha	150.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	0 Unit Usaha	0	PENDAPATAN TRANSFER		5000 Unit Usaha	11.000.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	180 Orang	100.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		150 Unit Usaha	700.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase UKM yang terakses pasar	-	100 %	158.000.000			100 %	22.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UKM yang difasilitasi lokasi penjualannya Presentase UKM yang terakses media promosi	-	60 % 60 %	158.000.000			100 % 100 %	22.000.000
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	0 Unit Usaha	0	PENDAPATAN TRANSFER		20 Unit Usaha	12.000.000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	10 Unit Usaha	158.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		30 Unit Usaha	10.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				50.000.000				774.000.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan	-	100 %	50.000.000			100 %	774.000.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan pengawasan ketransmigrasian	-	1 Kali	50.000.000			1 Kali	774.000.000
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	100.000.000
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-	0 Kepala Keluarga	0	PENDAPATAN TRANSFER		14 KK	200.000.000
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	40 Kepala Keluarga	35.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		15 KK	100.000.000
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-	0 Orang	0	PENDAPATAN TRANSFER		100 Orang	100.000.000
3.32.03.2.01.0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	-	0 Orang	0	PENDAPATAN TRANSFER		100 Orang	100.000.000
3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	-	0 KK	0	PENDAPATAN TRANSFER		15 KK	50.000.000
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	-	0 Paket	0	PENDAPATAN TRANSFER		15 Paket	100.000.000
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	0 Lokasi	0	PENDAPATAN TRANSFER		1 Lokasi	24.000.000
J U M L A H					7.213.225.044				14.126.603.344,54

Berdasar Tabel 4.1 Anggaran Rencana Tahun 2025 sebesar Rp 7.213.225.044,- dengan 9 Program, 16 Kegiatan, 64 Sub Kegiatan. Sedangkan Anggaran Rencana Tahun 2026 sebesar Rp 14.126.603.344,54,- dengan 9 Program, 16 Kegiatan, dan 64 Sub Kegiatan. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf; dan
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email : bappeda@ngawikab.go.id

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP PERTAMA
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN UKM

Pada hari ini Senin, 4 Maret 2024, bertempat di Ruang Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Dinas Koperasi Dan UKM. Tahun 2025 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 KARTIKA HAPSARI, JT, MM	ITA MARITA, SE
	 Edo Immanuel Wati

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AWAL
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM.
KABUPATEN : Ngawi
PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 4 Maret 2024

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah		✓		✓ Sesuai dengan Landasan hukum RKPD 2024
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2023)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Merjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Merjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Rianwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Merjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAHAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang diuraikan dengan sasaran target Kinerja Rencana Perangkat Daerah		✓		Tujuan dan Sasaran dibuat tabel
IV. RENCANA KERJA DAN PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH						
	Menjelaskan mengenai :	a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓			
		b. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓			
		c. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓			
		d. Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017		✓		Seharusnya sign format Permendagri no 86
V. PENUTUP						
	Berikan uraian penutup :	a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
		b. Kaedah-kaedah pelaksanaan	✓			
		c. Rencana tindak lanjut	✓			
		d. Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VI	LAMPIRAN					
	Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan HARUS SESUAI DENGAN RPJMD DAN RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH	✓			
		b Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Renstra Perubahan 2021-2026 (HARUS SESUAI DENGAN RPJMD DAN RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH)	✓			
		c Indikator Program/Kegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Renstra Perubahan 2021-2026 (yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra sesuai desk Kemendagri Tahun 2022)	✓			

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Eko Anwar Wati	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email : bappeda@ngawikab.go.id

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA

VERIFIKASI TAHAP AKHIR

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN UKM

Pada hari ini Senin, 29 Juli 2024, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2025 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 KARTIKA HAPSARI, ST, MM	ITA MARITA, SE
	 Eko Ambarsari

**LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN : Ngawi
PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 29 Juli 2024

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (AMBIL DARI APLIKASI SIMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 DAN TRIWULAN I TAHUN 2024)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :	a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓			
		b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓			
		c Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓			
		d Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
V	PENUTUP					
	Berisikan uraian penutup :	a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
		b Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
		c Rencana tindak lanjut	✓			
		d Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓			
VI	LAMPIRAN					
	Matriks Program/Kegiatan sesuai Pemutakhiran Ketiga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan (DOWNLOAD EXCEL DARI SIPD-RI, KEMUDIAN SECARA MANUAL INDIKATOR DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN RENSTRA/SEMUA INDIKATOR TAMPIL)	✓			

